



Makna Keadilan Gender dalam Perspektif Warga Negara Muda di Pedesaan

Wisnu Hatami^{1*}

¹ IAIN Syekh Nurjati, Cirebon

ABSTRAK: Isu gender selalu menarik untuk dibahas. Dengan luasnya cakupan yang dibahas dalam gender membuat berbagai hal dapat ditelaah melalui kacamata gender. Tidak kalah pentingnya untuk dibahas dalam gender adalah tentang bagaimana konsep gender pada masyarakat di pedesaan. Minimnya sosialisasi tentang gender tentu menarik untuk dielaborasi lebih jauh tentang sejauh mana pemahaman konsep gender di masyarakat pedesaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna keadilan gender dalam perspektif warga negara muda di pedesaan tidak berbeda dengan makna keadilan gender secara umum. Hanya saja pada masyarakat pedesaan lebih menekankan tentang keadilan dalam mendapatkan akses pendidikan.

Kata Kunci: Keadilan Gender; Warga Negara Muda; Desa.

ABSTRACT: Gender issues are always interesting to discuss. With the wide scope discussed in gender, various things can be examined through the lens of gender. No less important to discuss in gender is about how the concept of gender in rural communities. The lack of socialisation about gender is certainly interesting to elaborate further on the extent of understanding of the concept of gender in rural communities. The research method used is a case study with a qualitative approach. The results showed that the meaning of gender justice in the perspective of young citizens in rural areas is no different from the meaning of gender justice in general. It's just that rural communities emphasise more about justice in getting access to education.

Keywords: Gender Equality; Young Citizens; Village.

A. PENDAHULUAN

Sebagai isu yang selalu menarik perhatian berbagai kalangan, konsep gender memang belum habis untuk didiskusikan. Di berbagai negara manapun pasti masih memiliki persoalan tentang gender. Termasuk Indonesia, sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas tentu perkembangan gender di sini akan berkaitan dengan konsep-konsep lain seperti ekonomi pembangunan, pemberdayaan perempuan, isu lingkungan hingga isu hak asasi manusia. Isu ketidakadilan gender pada perempuan selalu menjadi pembahasan utama. Pada awalnya konsep ini muncul karena adanya berbagai ketidakadilan pada perempuan (Taufik et al., 2022). Bagaimana subordinasi, marginalisasi, stereotip, beban ganda bahkan kekerasan dalam rumah tangga masih muncul di pemberitaan. Minimnya keterampilan dan pengetahuan perempuan akan berakibat pada kecilnya kesempatan yang didapatkan perempuan dalam berbagai aspek (Ghassani et al., 2021).

Terdapat beberapa alasan yang membuat tulisan ini menarik untuk disimak. Pertama, masyarakat belum memahami konsep gender secara menyeluruh. Kedua, belum maksimalnya proses pengarusutamaan gender pada program pemerintah. Ketiga, isu gender bukan hanya berkaitan dengan perempuan, namun laki-lakipun dapat menjadi korban dari ketidakadilan

*Corresponding author.

E-mail address: wisnuhatami@syekhnurjati.ac.id

gender (Ismail et al., 2020). Keempat, tingkat Pendidikan suatu daerah akan ditentukan dari bentuk dan pola dari desa tersebut (Hukama, 2017). Kelima, perlu adanya keterlibatan warga negara dalam proses pembangunan di desa (Jemina et al., 2019). Keenam, masih terjadinya kesenjangan Pendidikan antara masyarakat kota dan desa (Vito & Krisnani, 2015) (Anas et al., 2015). Ketujuh, perempuan masih belum mendapatkan persepsi yang baik dalam bidang politik kenegaraan (Adi et al., 2022).

Isu gender bukan hanya berkaitan dengan kalangan tertentu. Sebagai hasil dari proses kontruksi sosial, gender selalu berkaitan erat dengan pertumbuhan masyarakat. Pada masyarakat kota maupun masyarakat desa, masing-masing memiliki isu gender tersendiri. Isu gender pada masyarakat kota misalnya tentang peran perempuan yang ingin diakui dan dibebaskan pada peran publik dan bukan hanya berperan pada sektor domestic di keluarga. Lain lagi tentang isu gender di pedesaan. Isu gender di pedesaan biasanya berkuat tentang bagaimana peran suami yang tidak menjadi pencari nafkah utama sehingga seorang istri dengan terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarga dengan cara menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke berbagai negara di luar Indonesia. Dengan begitu status, peran dan fungsi dalam keluarga menjadi tertukar dan menimbulkan persoalan lain.

Salah satu permasalahan gender yang sering terjadi yaitu ketidakadilan pada bidang pendidikan karena masih adanya masyarakat yang memiliki persepsi bahwa seorang perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi karena mereka menganggap setinggi apapun pendidikan seorang perempuan ujung-ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga yang tugasnya hanya mengurus suami dan anak dirumah. Oleh sebab itu, pengarusutamaan gender menjadi salah satu hal yang terpenting saat ini. Pendapat Puspitawati (2012) juga mengatakan bahwa gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat.

Bahwa warga negara muda perlu untuk memiliki berbagai keterampilan agar kelak ketika dewasa dapat menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Terlebih di era digital saat ini, kompleksitas kehidupan membuat keterampilan yang harus dimiliki individu semakin rumit. Maka, penting bagi warga negara muda untuk memahami konsep gender guna meningkatkan kesadaran gender sehingga mereka dapat semangat baru untuk mendapatkan kesempatan yang sama baik perempuan maupun laki-laki.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal pertimbangan bahwa data yang ingin ditemukan adalah data yang terkait dengan fenomena masih lemahnya konsep gender pada warga negara muda serta masing-masing perspektif subjek penelitian akan memberikan pendapat dengan sudut pandang yang berbeda. Maka, metode ini merupakan metode yang dirasa cocok.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu wawancara dengan para warga negara muda pedesaan yaitu di Desa Dompjong Wetan Kabupaten Cirebon sebanyak 5 orang yaitu Fajar (22), Wilmar (24), Nur Raudotul (23), Nilna (23) dan Afrizal (20). Observasi juga dilakukan dengan memperhatikan aspek yang membutuhkan konsep gender warga negara muda dalam bertindak. Sedangkan data sekunder dapat diperoleh dari dokumentasi dan studi literatur dari berbagai pendapat yang ada di jurnal ilmiah. Analisis data menggunakan Teknik Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Gender

Gender adalah seperangkat sikap, tanggungjawab, peran, fungsi dan juga hak yang melekat pada diri akibat dari budaya yang terbentuk (J, 2017). Ada konsep yang sangat penting yang harus dimengerti untuk membahas tentang persoalan gender. Dalam hal ini, penting untuk mampu membedakan antara konsep gender dan konsep jenis kelamin. Dengan hal ini diharapkan dapat lebih mengetahui lebih jauh tentang mana yang kodrat dan mana yang bukan kodrat laki-laki dan perempuan. Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, gender sendiri merupakan sebuah proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural (Ismail et al., 2020).

2. Keadilan Gender

Pengertian keadilan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Keadilan tidak harus bermakna sama persis dan persis sama. Dengan demikian, perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ini bukanlah suatu ketidakadilan, selama tidak memunculkan ketidakadilan dalam gender.

Konsep keadilan gender ini mengartikan bahwa tidak ada beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, penting untuk bebas dalam mendapatkan akses dan juga kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, serta memperoleh dampak yang sama besar dari proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat Handayani yang mengatakan bahwa terwujudnya keadilan gender apabila sudah tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam bidang apapun (Handayani, 2020).

Kesetaraan gender di Indonesia mulai diprogramkan pada saat ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, artinya pemahaman terhadap kesetaraan gender di masyarakat sudah lama ada, namun tidak semua masyarakat memahami makna dari kesetaraan gender sehingga pelaksanaan kesetaraan gender di dalam keluarga dirasa masih jauh dari harapan (Qomariah, 2019).

3. Kajian Tentang Warga Negara Muda

Setiap negara tentu memiliki warga negara muda di dalamnya. Warga negara muda biasanya dapat disebut sebagai remaja ataupun pemuda. Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 menyatakan bahwa yang disebut pemuda adalah warga negara yang memiliki usia 16 sampai dengan 30 tahun. Apabila diperhatikan, usia 16 sampai 30 tahun ini merupakan usia produktif manusia sehingga banyak hal yang perlu dilakukan untuk menjadi warga negara dewasa yang matang. Sejarah Indonesia pun mencatat bahwa para pemuda memiliki peran penting dalam perkembangan bangsa dari mulai peristiwa sumpah pemuda, proklamasi kemerdekaan, berbagai peristiwa dinamika bangsa hingga saat ini. Di dunia internasionalpun banyak forum yang didirikan pada mulanya oleh para pemuda (Murdiono, 2014). Maka, penting untuk membekali warga negara muda tentang berbagai aspek agar menjadi warga negara dewasa yang matang.

4. Konsep Gender dalam Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses perkembangan manusia untuk memiliki nilai kepribadian menjadi warga negara yang baik. Pendidikan akan membuat manusia menjadi lebih baik dari segi kognitif, afektif dan juga psikomotor. Selain itu pendidikan pun dapat berperan sebagai transformasi pada generasi selanjutnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berkepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Di samping itu, semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan Pendidikan yang layak tentu kecerdasan nasional bangsa akan semakin meningkat.

Dalam konteks gender dalam pendidikan, meskipun semakin hari semakin banyak yang sudah mengenal dan sadar tentang konsep gender dalam pendidikan, namun tetap saja masih ada perbedaan capaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Terlebih pada kalangan yang kurang mampu secara ekonomi. Faktor ekonomi ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk anak perempuan agar dapat membantu kondisi ekonomi keluarga.

Melihat kedudukan dan peranan strategis dari seorang ibu dalam proses pendidikan, maka sudah sewajarnya apabila peranan perempuan dalam proses pendidikan mendapatkan keadaan yang lebih baik. Kondisi dimana seorang ibu harus menjadi TKW ke luar negeri untuk menjadi tulang punggung keluarga di pedesaan sampai saat ini masih ada. Diharapkan kondisi ini ke depannya semakin minim karena anak akan terdampak dari kondisi seperti ini. Bahwa keadilan gender merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Negara Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara (perempuan dan laki-laki) mempunyai kesamaan hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang tercantum pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hukum harus tegak di negara hukum yang berkeadilan sosial (J, 2017). Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga penting (Umriana et al., 2016). Karena perempuan dalam dapat menjadi kelompok yang rentan terhadap pelanggaran ham dalam situasi tertentu (Kasmawati, 2017).

Maka, sudah sepatutnya bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan di pedesaan mendapatkan akses yang sama dalam mendapatkan Pendidikan.

Pemerintah juga perlu untuk terus mengurangi kesenjangan Pendidikan antara masyarakat desa dan kota. Beberapa Langkah yang bisa dilakukan adalah merenovasi bangunan sekolah, membangun perpustakaan di desa, dan memperbaiki sarana untuk menunjang Pendidikan di desa (Vito & Krisnani, 2015). Pendidikan kewarganegaraan di persekolahan juga perlu untuk diselipkan materi tentang gender agar warga negara muda memahami kesetaraan gender (Febrianti et al., 2020). Dari segi hukum, penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan karena perempuan masih mendapatkan perlakuan terkait dengan kekerasan fisik, mental dan seksual (Handayani, 2020). Mewujudkan kesetaraan dan juga keadilan gender (KKG) tentu bukan hal yang mudah. Melalui upaya yang dilakukan secara terus menerus dari yang sederhana hingga hal yang kompleks pasti akan terwujud (Pratiwi, 2017). Maka dari itu, penting untuk memberikan pemahaman tentang gender pada para warga negara muda baik itu di perkotaan maupun di pedesaan.

5. Analisa Keadilan Gender dalam Perspektif Warga Negara Muda di Pedesaan

Hasil penelitian didapati bahwa satu dari lima warga negara muda Desa Dompiong Wetan baru mengetahui istilah gender, meskipun sebelumnya pernah mendengar atau melihat kata gender. Selain itu, ada pula yang sebelumnya sudah mengetahui tentang konsep gender. Empat orang yang sudah mengetahui konsep gender karena sedang menjadi mahasiswa. Fajar (22) mengemukakan bahwa menurutnya gender merupakan sebuah konsep untuk tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Nur Raudotul (22) mengemukakan bahwa gender merupakan sebuah gerakan untuk memberdayakan perempuan dan gender merupakan gerakan yang berkaitan dengan feminisme yang dikemukakan oleh Nilna (23). Wilmar (24) mengatakan bahwa menurutnya, gender ialah sebuah konsep agar laki-laki dan perempuan dapat memiliki akses yang sama utamanya dalam mendapatkan pendidikan di persekolahan.

Dari beberapa pendapat tersebut, sebetulnya dapat dilihat bahwa pemahaman warga negara muda di pedesaan pun sudah memahami tentang konsep gender apabila warga negara muda tersebut memiliki akses terhadap perguruan tinggi karena dari hasil wawancara, didapati bahwa mereka mengetahui tentang konsep gender secara mendalam adalah melalui gerakan mahasiswa maupun melalui wawasan umum yang mereka dapat selama di kampus. Maka dari itu, penting bagi warga negara muda untuk terus mencari ilmu dan konsep-konsep untuk memperkuat keilmuan yang mereka miliki.

Selanjutnya, subjek penelittian mengemukakan bahwa konsep gender sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat luas karena dengan memahami konsep gender membuat masyarakat tidak perlu takut untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam proses pembangunan. Fajar berpendapat bahwa sebaiknya pemberdayaan perempuan dilakukan dengan cara perempuan dilibatkan dalam kegiatan mayarakat dan pemerintah turun langsung untuk memberikan bantuan kepada para perempuan dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Nilna yang mengatakan bahwa beberapa

temannya memilih untuk bekerja dibandingkan kuliah karena kuliah harus mengeluarkan biaya sedangkan bekerja mendapatkan upah/gaji.

Berkaitan dengan komitmen orangtua untuk menyekolahkan anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Dompok Wetan didapati data sebagai berikut. Pada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, didapati data bahwa baik anak perempuan maupun laki-laki setelah lulus SMA/MA, akan mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga dan membantu untuk membiayai adiknya untuk bersekolah. Peluang untuk bekerja menjadi buruh lebih banyak posisi untuk perempuan. Sedangkan pada keluarga yang sudah mapan, baik itu anak laki-laki maupun perempuan diberikan kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi. Untuk anak laki-laki dibebaskan untuk kuliah di luar kota sedangkan untuk anak perempuan biasanya kuliah di dalam kota saja. Beberapa alasan dari keputusan tersebut adalah agar biaya yang dikeluarkan tidak begitu banyak, orangtua dapat mengawasi aktivitas anak dan menganggap bahwa kuliah di luar kota maupun di dalam kota sama saja outputnya.

Sedangkan respon terkait pendapat perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, warga negara muda Desa Dompok Wetan berpendapat bahwa sekolah juga diperlukan untuk perempuan karena dengan bersekolah dapat menambah aktivitas di luar rumah. Selain itu, dengan bersekolah dapat menambah wawasan dan informasi baru yang didapat dari guru, dosen maupun dari teman. Dalam aktivitas di masyarakat, perempuan juga ingin adanya kegiatan seperti olahraga bersama atau kegiatan untuk sama-sama saling memberdayakan perempuan. Seperti diungkapkan Nilna bahwa di des aini hanya ada tim voli laki-laki, tim sepakbola laki-laki, sedangkan aktivitas olahraga untuk perempuan tidak ada.

Secara umum, masyarakat Desa Dompok Wetan berharap kepada pemerintah untuk melakukan beberapa hal. Pertama, untuk lebih memperhatikan Pendidikan perempuan karena untuk mendapatkan akses pekerjaan yang lebih baik. Kedua, adanya bantuan atau beasiswa tambahan untuk keluarga kurang mampu. Ketiga, menjamin keselamatan perempuan dalam bekerja. Keempat, adanya kegiatan untuk para pemuda dalam aktualisasinya pada masyarakat umum.

Dari data-data yang dikemukakan sebelumnya, beberapa hal menarik untuk dibahas lebih lanjut. Bahwa konsep Gender adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya. Misalnya, secara umum, pekerjaan memasak, mengurus anak, mencuci selalu disebutkan hanya sebagai pekerjaan perempuan. Pandangan seperti ini merupakan ciptaan masyarakat dari budaya tertentu, padahal pekerjaan tersebut dapat juga dipertukarkan dengan laki-laki atau dapat dikerjakan oleh laki-laki.

Karakteristik atau ciri-ciri ini menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebut perbedaan gender. Ini sering mengakibatkan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Peran sosial atau yang sering disebut peran gender ini sangat berpengaruh terhadap pola relasi kuasa antara pria dan wanita yang sering disebut sebagai relasi gender. Sebagai sebuah konstruksi budaya, gender memang telah memberikan makna terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan

makna yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tersebut, masyarakat membuat pembagian kerja atau peran antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pembagian peran tersebut, dalam kenyataannya tidak didasarkan pada asas kesetaraan dan keadilan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggungjawab yang sama sebagai manusia.

Konstitusi kita UUD 1945 telah menjamin hak setiap warganegara untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran gender diharapkan juga dapat mendorong terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, politik dan dalam pengambilan keputusan. Meskipun masih banyak yang menyebabkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaannya. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan pemerintahan berjalan efektif. Dengan demikian, program pengarusutamaan kesetaraan gender adalah termasuk dalam bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat baik perempuan maupun laki-laki untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Masyarakat pedesaan tentu lebih sederhana dibandingkan masyarakat perkotaan yang hidupnya lebih kompleks. Namun, masyarakat pedesaan masih memiliki ikatan yang kuat antar sesama anggota masyarakat pedesaan lainnya. Jadi, semakin banyaknya masyarakat pedesaan yang paham tentang konsep gender tentu akan semakin banyak pula warga negara yang semakin berdaya. Semakin banyak warga negara yang berdaya tentu akan semakin maju pula negaranya.

Adanya anggapan masyarakat yang masih menganggap bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama. Karena itu dalam pendidikan mereka lebih diutamakan. Pandangan-pandangan seperti inilah yang menyebabkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tentu perlu ada upaya agar terjadi perubahan cara pandang. Keadilan dan kesetaraan adalah gagasan dasar agar adanya kesempatan yang sama baik laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan hampir setengah dari seluruh penduduk Indonesia dan merupakan potensi yang sangat besar dalam mencapai kemajuan dan kehidupan yang lebih berkualitas. Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah.

D. SIMPULAN

Makna keadilan gender dalam perspektif warga negara muda di pedesaan tidak berbeda dengan makna keadilan gender secara umum. Hanya saja pada masyarakat pedesaan lebih menekankan tentang keadilan dalam mendapatkan akses pendidikan. Pada masyarakat perkotaan seringkali ditemukan adanya keinginan perempuan ingin mendapatkan akses kerja, sementara di pedesaan pihak perempuan kerap kali terpaksa harus menjadi tenaga kerja wanita untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Kaitannya gender dalam pendidikan, diharapkan masyarakat semakin sadar tentang keadilan gender dan para orang tua mampu untuk memberikan kesempatan yang sama baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki untuk memperoleh Pendidikan yang layak. Kepada para warga negara muda di pedesaanpun diharapkan untuk tidak patah semangat dan terus bersekolah agar memperbesar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak di kemudian hari.

REFERENSI

- Adi, J., Razak, F. S. H., & Kurniawan, H. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 122–137. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/7267>
- Anas, A. Y., Riana, A. W., & Apsari, N. C. (2015). Desa Dan Kota Dalam Potret Pendidikan. *Desa dan Kota dalam Potret Pendidikan*, 2(3), 418–422. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.13592>
- Febrianti, N., Abdulkarim, A., Malihah, E., & Fitriasari, S. (2020). Analisis Muatan Kajian Gender pada Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 10(1), 70–77. <https://doi.org/10.21067/jip.v10i1.4328>
- Ghassani, S., Mustika, M., & Sari, K. (2021). Penguatan Karakter Kewarganegaraan Bagi Perempuan Pedesaan Melalui Sekolah Perempuan Desa Sumberejo Kota Batu. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 09(1), 124–140.
- Handayani, T. A. (2020). Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, 1(1), 18–29.
- Hukama, A. F. (2017). Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pendidikan Tinggi (Studi Analisis Teori George Herbert Mead). *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.18860/jpips.v4i1.7298>
- Ismail, Z., Lestari, M. P., Rahayu, P., & Eleanora, F. N. (2020). Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis. *Sasi*, 26(2), 154. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>
- J, R. W. (2017). Analisis Gender Dalam Bingkai Kewarganegaraan Dan Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Qistie*, 10(2), 95–107. <https://doi.org/10.31942/jqi.v10i2.2007>
- Jemina, E., Suciati, & Iswahyudi, D. (2019). Keterlibatan Warga Negara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan Desa. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen*, 3, 17–24. <https://conference.unikama.ac.id/artikel/index.php/fip/index>
- Kasmawati, A. (2017). Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender. *Seminar Nasional LP2M UNM*, 539–542. <http://ips.pps.unm.ac.id/wp-content/uploads/sites/21/2020/11/Perlindungan-Hak-Perempuan-dalam-Perspektif-Keadilan-Gender.pdf>
- Murdiono, M. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda. *Cakrawala Pendidikan*, XXXIII, 349–357.

Pratiwi, Y. E. (2017). Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Hukum Dan Kewarganegaraan Di Indonesia. *Qistie*, 10(2), 167–181. <https://doi.org/10.31942/jqi.v10i2.2008>

Taufik, M., Hasnani, & Suhartina. (2022). Persepsi Masyarakat terhadap Kesetaraan Gender dalam Keluarga (Di Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang). *Jurnal Agama Dan Masyarakat*, 5(1), 50–66. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Umriana, A., Fauzi, M., & Hasanah, H. (2016). Penguatan Hak Asasi Perempuan. *Sawwa*, 12, 41–60.

Vito, B., & Krisnani, H. (2015). Kesenjangan Pendidikan Desa Dan Kota. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 247–251. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13533>